

ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2018

Sofia Janahtul Isnaini¹, Ris Yuwono Yudo Nugroho²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Trunojoyo Madura

¹sofiaIsnaini954@gmail.com / ²ris.nugroho@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan konsep multidimensi yang meliputi dimensi sebagai kurangnya kesempatan, kurangnya pemberdayaan, dan kurangnya keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kemiskinan serta pengaruhnya terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan adalah data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Jenis data yang digunakan adalah *cross section* yaitu tahun 2018. Dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda (OLS) dengan Kemiskinan sebagai variabel dependen, pertumbuhan ekonomi (PDRB), angkatan kerja, dan APBD sebagai variabel independen, serta menggunakan variabel dummy wilayah untuk melihat pengaruh daerah kantong kemiskinan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Dummy 1 untuk daerah tapal kuda, dan dummy 2 untuk daerah pulau madura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan APBD mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Dummy 1 (D1) memiliki probabilitas sebesar 0,6532 ($>0,05$) yang berarti variabel D1 tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Kemudian untuk variabel D2 atau daerah di pulau madura memiliki tingkat probabilitas sebesar 0,0233 ($<0,05$) yang berarti signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2018.

Kata kunci: kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, APBD, Jawa Timur

ABSTRACT

Poverty is a multidimensional concept that includes dimensions as lack of opportunity, lack of empowerment, and lack of security. This study aims to analyze the determinants of poverty and their effects on poverty in East Java Province. This research uses quantitative methods, and the data used are data from the Central Statistics Agency of East Java Province. The type of data used is a cross-section in 2018. This study uses multiple linear analysis (OLS) with poverty as the dependent variable, economic growth (GRDP), labor force, and APBD as independent variables. It uses regional dummy variables to see the effect of poverty enclaves on poverty in East Java. Dummy 1 for the "tapal kuda" area, and dummy 2 for the Madura island area. The results showed that the GRDP and regional budget had a negative and significant effect on poverty. Labor force variables have a positive and significant impact on poverty in East Java Province in 2018. Dummy 1 (D1) has a probability of 0.6532 (> 0.05), which means that the D1 variable is not significant to poverty in East Java. Then for the D2 variable or region on the island of Madura has a probability level of 0.0233 (<0.05), which means significant for poverty in East Java in 2018.

Keywords: poverty, economic growth, labor force, regional budget, East Java.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial,

sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan penghapusan kemiskinan secara mutlak. (Todaro, 2011).

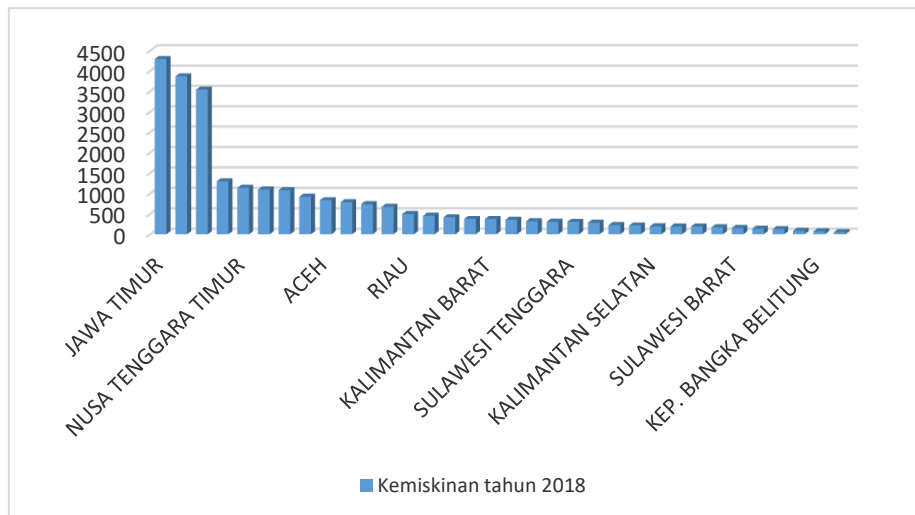
Salah satu aspek penting selain pertumbuhan ekonomi untuk melihat kinerja pembangunan adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia. Selain itu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan suatu negara juga dapat dilihat dari menurunnya jumlah penduduk miskin. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari lingkup daerah, regional, nasional, dan internasional. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah penting, meskipun beberapa kebijakan sudah dilakukan.

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi. Menurut *World Bank* (2002) ada beberapa dimensi diantaranya dimensi sebagai kurangnya kesempatan, kurangnya pemberdayaan, dan kurangnya keamanan. Dari sisi ekonomi penyebab kemiskinan dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya alam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dikarenakan rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal (Kuncoro, 1997).

Apabila hal tersebut terus dibiarkan tanpa ada pemutusan rantai kemiskinan maka siklus yang ada terus berputar. Maka salah satu cara yaitu dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang bergerak sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin kisaran juta jiwa. Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Inonesia yaitu mencapai 4292,15 juta jiwa. Hal ini membuat penulis tertarik menjadikan Jawa Timur sebagai objek penelitian.

Menurut Todaro (2011) bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pedapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain da (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Timbulnya kemiskinan juga dikarenakan rendahnya kemampuan masyarakat mengakses lapangan kerja dan sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapat kesempatan kerja. Pengangguran berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan belanja pembangunan. Dengan demikian, strategi pengoptimalan dan pengelolaan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sektor-sektor pembangunan. Pertumbuhan ekonomi akan menekan tingkat pengangguran dan mengurangi jumlah kemiskinan di daerah (Setiyawati & Hamzah, 2007).



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018, data diolah

Gambar 1
Jumlah penduduk miskin di Indonesia Menurut provinsi tahun 2018

Tabel 1
Penduduk menurut jenis kegiatan utama jawa timur 2016 - 2018

Uraian	Satuan	2016		2017		2018
		Feb	Agus	Feb	Agus	Feb
Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas	juta	30,03	30,17	30,31	30,44	30,57
Angkatan kerja	juta	20,50	19,95	20,89	20,94	21,00
Bekerja	juta	19,65	19,11	20,03	20,10	20,20
Penganggur	juta	0,85	0,84	0,86	0,84	0,81
Bukan Angkatan Kerja	juta	9,53	10,21	9,42	9,51	9,57
Sekolah	juta	2,33	2,32	2,18	2,17	2,22
Mengurus Rumah Tangga	juta	5,85	6,59	5,95	6,13	6,06
Lainnya	juta	1,35	1,30	1,28	1,21	1,29
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,27	66,14	68,93	68,78	68,71
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,14	4,21	4,10	4,00	3,85
Pekerja Tidak Penuh	juta	6,28	5,60	6,26	5,73	6,77
Setengah penganggur	juta	1,61	1,34	1,23	1,23	1,46
Paruh waktu	juta	4,66	4,26	5,03	4,49	5,31

Sumber: Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2018

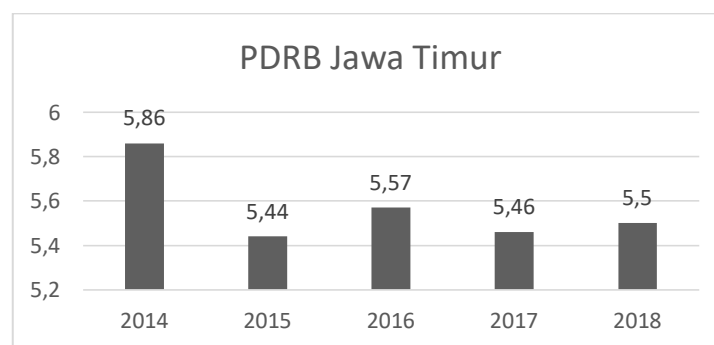
Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada tabel 1 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 21 juta orang. Tingkat pengangguran turun sebesar 0,15 persen. Akan tetapi peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut tidak serta merta berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengalami penurunan dari 68,78 persen menjadi 68,71 persen atau turun hanya sebesar 0,07 persen pada bulan Februari 2018 dibandingkan TPAK pada bulan Februari 2017 yang turun sebesar 0,22 persen.

Kemiskinan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi masalah nasional. Kemiskinan mempunyai keterkaitan dengan masalah-masalah sosial di Indonesia. Kemiskinan juga tidak luput melanda Jawa Timur. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan perlu diketahui faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur (Puspita, 2015).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Kedalaman kemiskinan di tingkat pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Kemudian upaya yang dilakukan pemerintah daerah salah satunya yaitu Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra). Program Jalin Matra memiliki tiga sasaran kegiatan yakni penanggulangan feminisasi kemiskinan, bantuan RSTM, dan penanggulangan kemiskinan. Program Jalin Matra selama 5 tahun berjalan telah menjangkau 48.143 rumah tangga sangat miskin di 752 desa seluruh Jawa Timur. Adapun kegiatan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) telah menjangkau 814 desa. Proram Jalin Matra ikut menumbang penurunan angka kemiskinan pedesaan di Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan kunci dari penurunan kemiskinan pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Dari PDRB atas harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi selama rentang waktu 2014 sampai dengan 2018 berada pada keadaan yang berfluktuasi. Dari tahun 2014 sebesar 5,86 persen dan turun pada tahun 2015 mencapai angka 5,44 persen. Hal ini dikarenakan adanya perlambatan ekonomi dunia yang berimbas terhadap perekonomian di Jawa Timur. Namun pada tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur berjalan secara fluktuatif yang tidak terlalu tinggi selisihnya. Pada tahun 2018 PDRB Jawa Timur mencapai angka 5,5 persen (Gambar 2)

Gambar 2
Pertumbuhan ekonomi menurut harga konstan provinsi jawa timur
Tahun 2014 - 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Tabel 2 menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi berada pada Kabupaten Sampang sebesar 21,21 persen. Disusul oleh Kabupaten Sumenep yang tingkat kemiskinan mencapai 20,16 persen. Lalu kemudian Kabupaten Bangkalan mencapai 19,59 persen. Pada posisi ke empat terdapat Kabupaten Probolinggo dengan tingkat kemiskinan sebesar

18,71 persen. Jika dilihat dari tabel di bawah, daerah kantong kemiskinan masih seputar pulau Madura dan daerah tapal kuda lainnya.

Tabel 2
Presentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Timur tahun 2018

Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk Miskin	Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk Miskin
Kab. Sampang	21.21	Kab. Magetan	10.31
Kab. Sumenep	20.16	Kab. Mojokerto	10.08
Kab. Bangkalan	19.59	Kab. Lumajang	9.98
Kab. Probolinggo	18.71	Kab. Jember	9.98
Kab. Tuban	15.31	Kab. Blitar	9.72
Kab. Ngawi	14.83	Kab. Jombang	9.56
Kab. Pamekasan	14.47	Kab. Pasuruan	9.45
Kab. Bondowoso	14.39	Kab. Banyuwangi	7.8
Kab. Pacitan	14.19	Kota Kediri	7.68
Kab. Lamongan	13.8	Kota Blitar	7.44
Kab. Bojonegoro	13.16	Kab. Tulungagung	7.27
Kab. Nganjuk	12.11	Kota Probolinggo	7.2
Kab. Trenggalek	12.02	Kota Pasuruan	6.77
Kab. Gresik	11.89	Kab. Sidoarjo	5.69
Kab. Situbondo	11.82	Kota Mojokerto	5.5
Kab. Madiun	11.42	Kota Surabaya	4.88
Kab. Kediri	11.31	Kota Madiun	4.49
Kab. Malang	10.37	Kota Malang	4.1
Kab. Ponorogo	10.36	Kota Batu	3.89

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2018)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Determinan Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2018” serta membandingkan kemiskinan di daerah Tapal Kuda dan Madura dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur karena dua daerah tersebut masih menempati peringkat tertinggi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Adapun rumusan masalah yang ingin diketahui adalah sebagai berikut:

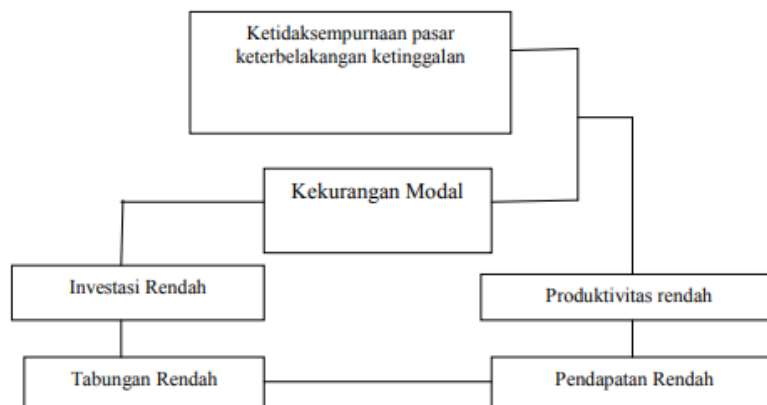
1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018?
2. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018?

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi pada setiap pembangunan dan bersifat multidimensi karena cara mengatasinya bukan hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan sebab-akibat munculnya kemiskinan namun juga melibatkan preferensi, nilai, dan politik. Kemiskinan dalam arti sempit merupakan keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multiface atau multidimensional. Menurut Haungton & R. Khandker (2012) dalam bukunya yang berjudul “Pedoman untuk Kemiskinan dan Ketimpangan” di jelaskan bahwa faktor penyebab kemiskinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karakteristik wilayah, karakteristik masyarakat, karakteristik rumah tangga dan individu, karakteristik demografi, karakteristik ekonomi, dan karakteristik sosial. Selain itu penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang ditemukan oleh Ragnar Nurkse (1953) dan mengatakan: “*a poor country is poor because it is poor*” bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin. Lingkaran setan pada pokoknya berasal dari fakta bahwa produktivitas total pada suatu negara sangat rendah, sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan perekonomian. Jika dilihat dari sudut pandang permintaan, rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan tingkat permintaan jadi rendah, sehingga pada gilirannya tingkat investasi juga rendah, investasi yang rendah menyebabkan modal yang kurang dan produktivitas rendah (Jhingan, 1983) (Gambar 3)

Gambar 3
Ligkaran Setan Kemiskinan (*Vicious circle of poverty*)



Sumber: Nurske dalam Mudrajad Kuncoro (1997)

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output nasional suatu periode tertentu terhadap periode sebelumnya. Menurut Arsyad (1997) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara umum adalah jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan usaha di suatu daerah (region) tanpa memperhatikan pemelihan atas produksi. Oleh karena itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah tertentu dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

Angkatan Kerja

Untuk dapat memperoleh kenaikan pendapatan nasionalnya, jumlah penduduk suatu negara harus seimbang dengan jumlah sumber-sumber ekonominya. Jumlah penduduk tidak boleh terlampaui sedikit juga tidak boleh terlampaui banyak. Jumlah penduduk yang makin besar akan berakibat angkatan kerja yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula orang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat mencapai keadaan yang seimbang maka sebisanya mereka tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan yang sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru. Dengan demikian pembangunan ekonomi diperlukan untuk memperkecil pengangguran. Dengan pembangunan ekonomi diharapkan laju pertumbuhan dapat selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk.

Menurut Sumarsono (2004) angkatan kerja (labor force) adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Arti dari mampu adalah secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan.

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dumairy (1996) menyebutkan bahwa pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi (Sunusi, 2014).

Penelitian Terdahulu

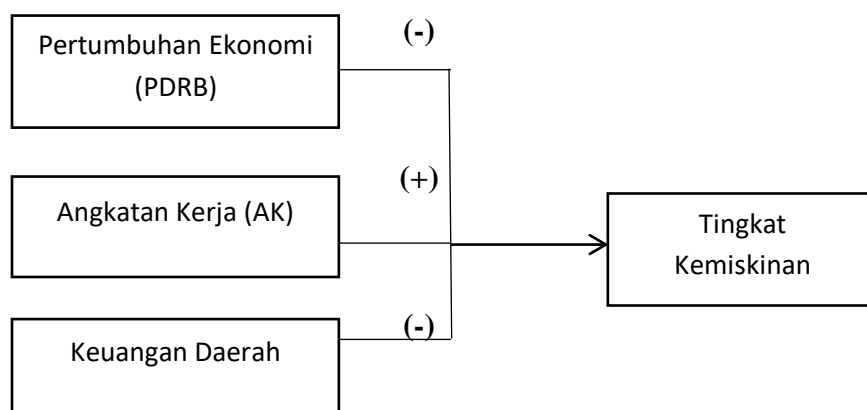
Sebagai salah satu bahan acuan dari penelitian ini, adapun referensi penyusun adalah penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Istri Diah Paramitha dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja (2015) dengan judul penelitiannya Pengaruh investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan di provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi serta pengaruh investasi dan pengangguran terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode teknik analisis jalur (path analysis). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu secara langsung variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara langsung variabel investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kemudian

pengaruh investasi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan.

Penelitian Novita Ika Sari (2018) dengan judul penelitiannya Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007 -2014. Metode penelitian yang digunakan yaitu OLS dan data yang digunakan yaitu data panel atau gabungan dari cross section dan time series. Hasil analisis data menunjukkan variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah sektor pekerjaan umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian Adi Widodo, Waridin, dan Johanna Maria K (2011) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengilustrasikan pola pengembangan pengeluaran publik pada pendidikan dan kesehatan, IPM, dan indikator kemiskinan di Jawa Tengah. Kemudian untuk menganalisis peran IPM dalam menangani hubungan antara pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan, serta pengurangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil studi menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan, namun secara bersama-sama (simultan) pengeluaran sektor publik dan IPM dapat mempengaruhi kemiskinan.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
2. Diduga angkatan kerja berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
3. Diduga Pendapatan dan Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Obyek yang digunakan adalah data cross section sebanyak 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Variabel yang digunakan dalam penelitian ialah tingkat kemiskinan dengan menggunakan jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen menggunakan PDRB atas harga konstan tahun 2018, jumlah angkatan kerja, APBD dengan menggunakan data Belanja Daerah, serta variabel dummy 1 yang merupakan bagian yang termasuk daerah tapal kuda, dan dummy 2 yang merupakan bagian daerah di pulau madura.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan variabel dummy dan alat analisis OLS (Ordinary Least Square). Adapun model persamaan yang digunakan sebagai berikut:

$$KM_i = \beta_0 + \beta_1 PDRB_i + \beta_2 AK_i + \beta_3 APBD_i + \beta_4 Dk_i + \beta_5 Dk_{ii} + \varepsilon_i$$

Dimana KM merupakan kemiskinan, β_0 adalah konstanta, $\beta_{1,2,3,4,5}$ adalah koefisien regresi variabel bebas, PDRB, AK adalah angkatan kerja, APBD, Dki,ii adalah variabel dummy, dan ε adalah komponen error.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara nyata hubungan variabel bebas terhadap variabel terkait, baik secara simultan maupun parsial. Pengujian dilakukan dengan koefisien determinasi R², uji simultan (uji f), dan uji parsial (uji t). R square digunakan untuk mengetahui baik atau tidak suatu model regresi. Nilai R square berkisar antara 0 sampai 1. Model dianggap baik atau dengan kata lain variabel bebas semakin dekat hubungannya dengan variabel terikat jika nilai R square semakin besar.

Uji f bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 0,05. Kriteria pengujian yaitu apabila probabilitas F-statistik < 0,05 berarti variabel-variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Selanjutnya yaitu uji t yang bertujuan untuk menjelaskan seberapa jauh variabel independen secara parsial atau individual terhadap variabel dependen dengan kata lain apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian model OLS regresi linear, model regresi harus memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik harus memenuhi syarat yaitu data harus berdistribusi normal, homokedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Karena data penelitian ini cross section, maka uji autokorelasi tidak perlu dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan pada model menunjukkan angka 0,876964 yang artinya 87,69% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, dan sisanya sebesar 12,31% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Kemudian hasil pada uji F menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Hal ini dikarenakan hasil uji F menunjukkan angka $0,000000 < 0,05$. Hasil uji t dapat dijelaskan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dengan nilai koefisien sebesar -5893,09, nilai t-statistik sebesar -6,769345 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 0,05$). Variabel angkatan kerja (AK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Selanjutnya APBD memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0043 ($< 0,05$) dan koefisien sebesar $-2,28E-08$ yang berarti variabel APBD signifikan dan mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Uji Regresi Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Metode uji normalitas adalah histogram. Uji normalitas dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari α , maka model regresi adalah berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji histogram menyatakan probabilitas sebesar 0,317249 ($> 0,05$) sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi secara normal.

Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji heterokedastisitas. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode uji gletjser. Penelitian dikatakan memiliki masalah heterokedastisitas apabila error atau residual model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Pada uji gletjser diketahui bahwa nilai probabilitas PDRB sebesar 0,2053 ($> 0,05$), Angkatan Kerja (AK) sebesar 0,9564 ($> 0,05$) dan nilai probabilitas APBD sebesar 0,9555 ($> 0,05$). Dari ketiga data tersebut dapat disimpulkan bahwa data tidak mengandung masalah heterokedastisitas dan lolos uji gletjser.

Dummy

Terdapat dua dummy pada model penelitian. Dummy 1 (D1) adalah daerah untuk wilayah tapal kuda, dan dummy 2 (D2) adalah untuk wilayah pulau madura. Dummy 1 (D1) memiliki probabilitas sebesar 0,6532 ($> 0,05$) yang berarti variabel D1 tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Kemudian untuk variabel D2 atau daerah di pulau madura memiliki tingkat probabilitas sebesar 0,0233 ($< 0,05$) yang berarti signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2018.

Pembahasan

Dari hasil pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan kemiskinan di Jawa Timur tahun 2018. Berdasarkan koefisien yang negatif pada -58923,09 menunjukkan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 1% akan membuat angka kemiskinan di Jawa Timur turun sebanyak 58923,09. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Istri Diah Paramitha dan Ida Bagus Putu Purbadarmaja (2015), dan Mochammad Dwi A.R, Mohammad Saleh, Aisah Jumiaty

(2017). Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan sesuai dengan harapan adanya efek menetas kebawah (trickle down effect), dimana pertumbuhan ekonomi diyakini mampu mengatasi masalah pembangunan diantaranya kemiskinan dengan menunjukkan peningkatan output, output akan meningkat apabila faktor-faktor produksi pembentuknya juga mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitas, salah satunya tenaga kerja. Peningkatan produksi berarti menunjukkan peningkatan produktivitas yang berarti pendapatan tenaga kerja pun meningkat. Meningkatnya pendapatan akan meningkatkan daya beli tenaga kerja sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhannya.

Variabel angkatan kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti semakin banyak angkatan kerja namun tidak bekerja maka akan menambah jumlah masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur.

Dari hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh hasil bahwa APBD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo, Waridin, dan Maria (2011) bahwa alokasi pengeluaran pemerintah digunakan untuk pembangunan masyarakat sehingga dapat menekan angka kemiskinan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PDRB dan kemiskinan, variabel angkatan kerja dan kemiskinan, variabel APBD terhadap kemiskinan. Dari ketiga variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. W., Nurjani, Y. & Susanti, P., 2017. Aplikasi Pemberian Kredit Mikro Pada Bank XYZ Dengan Metode Analytical Hierarchy Process. *Fortech (Journal of Information Technology)*, 1(2), pp. 15-21.
- Kamil, A., Bakhtiar, A. & Sriyanto, 2016. Pemilihan Bahan Pewarna Alam Batik Tulis di Usaha Kecil dan Menengah Semarang Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) (Studi Kasus UKM Batik Semarang). *Industrial Engineering Online Journal*, 5(2).
- Mukti, M. D. L., Makmur, M. & Adiono, R., 2015. Strategi Pengembangan Kawasan Barat Sungai Brantas Kota Kediri Sebagai Destinasi Pariwisata Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kawasan Objek Wisata Selomangleng Kota Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(11), pp. 1797-1803.
- Nurhadi, F. D. C., Mardiyono & Rengu, S. P., 2014. Strategi Pengembangan Pariwisata Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), pp. 325-331.

- Primadany, S. R., Mardiyono & Riyanto, 2013. Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4), pp. 135-143.
- Setyaningrum, A., Setyorini, H. B. & Masduqi, E., 2017. Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut di Pantai Depok Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Sosek KP*, 7(2), pp. 179-190.
- Simanjorang, R. M., 2018. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Lulusan Terbaik Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process Pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Mantik Penusa*, 2(1), pp. 1-10.
- Susilawati, Mappamiring, H. & Said, A., 2016. Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Bira Sebagai Sumber Unggulan Pendapatan Asli di Daerah Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), pp. 351-366.
- Sutinah, E. & Nisa, K., 2018. Kombinasi Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process dan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution dalam Pemilihan Supplier. *Informatics For Educators and Professionals*, 2(2), pp. 115-124.
- Syamiruddin, 2014. Sistem Pendukung Keputusan Pembelian Mesin Tugot Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) (Studi Kasus: PT. Pelayaran Sopia Line). *Jurnal SISTEMASI*, 3(1), pp. 54-67.
- Widodo, A., Waridin & Maria K, J., 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), pp. 25-42.